



Judul : RUU P2SK Disetujui Saat Pasar Tersungkur
Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

SEKTOR KEUANGAN

RUU P2SK Disetujui Saat Pasar Tersungkur

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (4/6/2026) ini. Regulasi sektor keuangan tersebut direvisi saat pasar keuangan domestik tengah dilanda gejolak hingga berkali-kali menyentuh rekor terendah.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6) sore, pemerintah dan DPR menyepakati RUU P2SK pada pembahasan tingkat pertama. Sesuai jadwal, pengambilan keputusan atas RUU P2SK atau pembahasan tingkat kedua akan diadakan dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis ini.

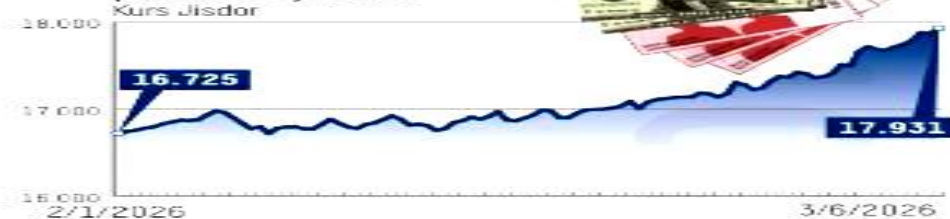
Revisi UU sektor keuangan itu diharapkan memperkuat sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan pasar. Belakangan ini pasar keuangan terpuruk. Hal itu tecermin dari berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Gejolak ini disebabkan oleh faktor global dan domestik.

[Bersambung ke him 15 kol 1-2]

Pergerakan IHSG (Per Tahun) 2026



Pergerakan Kurs Dollar (Per Tahun) 2026



Sumber: BPS RI, Badan Statistik Keuangan/2026

INFORMATIK, INSELM, 2026



RUU P2SK Disetujui Saat

(Sambungan dari halaman 1)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, revisi RUU P2SK bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing global dan kepastian hukum. Langkah ini juga untuk memperjelas pembagian peran dan kewenangan antarlembaga otoritas keuangan.

"Ini diharapkan mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan," katanya.

Ada 17 materi perubahan yang dibahas dalam revisi UU P2SK, antara lain kelembagaan otoritas keuangan, evaluasi otoritas keuangan oleh DPR, dan perluasan usaha perbankan. Perubahan juga mencakup demutualisasi bursa efek, transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan, surat utang Danantara, perusahaan asuransi dalam resolusi, denda pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas, bursa mineral dan komoditas strategis, serta pengaturan aset kripto.

Pasar makin bergejolak

Pada saat yang sama, pasar keuangan domestik kembali bergejolak. Nilai tukar rupiah dalam pasar spot pada perdagangan Rabu ditutup di level Rp 17.931 per dolar AS, melemah 7,21 persen secara tahunan kalender berjalan. IHSG dalam sesi penutupan pun ikut anjlok 4,11 persen ke level 5.941,07. Tekanan ini terjadi seiring keluarnya arus modal asing sebesar Rp 993,23 miliar sehingga total arus modal keluar secara tahunan kalender berjalan mencapai Rp 56,35 triliun.

Pada hari yang sama, lembaga pemeringkat kredit global Moody's Ratings juga memberikan proyeksi (*outlook*) kredit negatif bagi Danantara Investment Management. *Outlook* ini sejalan dengan peringkat kredit Indonesia yang awal tahun ini dipangkas menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, pasar keuangan domestik masih tertekan meski BI

sudah menaikkan suku bunga dan memperkuat intervensi. "Kenaikan BI Rate ke level 5,25 persen membantu mempertahankan daya tarik aset rupiah, tetapi pasar juga membaca biaya modal yang lebih tinggi bagi emiten dan sektor riil," katanya.

Akibatnya, IHSG pun ikut tertekan. Ini sejalan dengan sentimen pasar terhadap kombinasi yang sulit, meliputi kenaikan suku bunga, kebutuhan likuiditas di pasar saham, laba emiten, dan prospek pertumbuhan yang lebih meyakinkan.

Menurut Syafruddin, langkah penguatan kelembagaan melalui revisi UU P2SK, penguatan koordinasi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kenaikan suku bunga, serta intervensi di pasar valas dapat membantu memulihkan kepercayaan pasar jika otoritas menjalankannya secara kredibel, konsisten, dan terukur.

Namun, efektivitasnya akan tetap bergantung pada batas yang jelas antara pengawasan politik dan independensi teknokrat. Investor akan mendukung penguatan BI, OJK, dan LPS selama DPR mampu memperkuat akuntabilitas tanpa menekan keputusan teknis.

"Pemerintah dan otoritas keuangan perlu merespons gejolak pasar dengan paket kebijakan yang menasar akar risiko, bukan sekadar meredakan gejala harian," ujarnya.

Ia mengingatkan, pemerintah sebaiknya menghindari kebijakan yang menambah ketidakpastian regulasi. Apalagi, pelaku pasar saat ini terus memperhatikan pelemahan nilai tukar, penurunan premi risiko, dan reformasi kelembagaan.

Analisis pasar saham MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menambahkan, pergerakan IHSG cenderung dipengaruhi oleh emiten-emiten konglomerasi yang berbalik anjlok setelah dua hari terakhir menguat signifikan. Dari sisi teknikal, pergerakan IHSG pun masih berada di fase *downtrend* (penurunan) dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah yang valid. (AGP)